

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan utama masyarakat Indonesia. Kemiskinan membentuk segala keterbatasan yang dialami oleh masyarakat baik secara sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai negara agraris, potensi pertanian di Indonesia tak sepenuhnya ikut serta dalam mensejahterakan masyarakat yang berkecimpung di dalamnya. Salah satunya adalah keberadaan perkebunan yang menciptakan relasi kuasa yang asimetris (timbang) sehingga menjadikan perkebunan sebagai wadah reproduksi kemiskinan.

Secara umum, pola perkebunan di Indonesia menganut sistem dualisme, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat (Ditjenbun, 2019). Perkebunan besar merupakan sistem perkebunan yang dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum. Jenis perkebunan ini berupa perkebunan milik negara (BUMN) dan milik swasta. Adapun perkebunan rakyat adalah sistem perkebunan yang dikelola oleh pemilik kebun/masyarakat yang tidak berbadan hukum. Kemitraan yang dijalin antara perkebunan besar dengan perkebunan rakyat akan membentuk pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN). Program kemitraan ini adalah upaya pemerintah untuk menjadi solusi bagi ketersediaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, baik itu berskala regional maupun nasional.

Eksistensi perkebunan PIR hingga saat ini berkorelasi dengan kebijakan pemerintah tentang pengadaan perkebunan rakyat. Berdasarkan UU Permentan Nomor 21 tahun 2017 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, seluruh perkebunan besar yang mengajukan IUP (Izin Usaha Perkebunan) dengan luas

lahan di atas 250 hektar berkewajiban memfasilitasi pembangunan perkebunan rakyat sebesar 20% dari luas areal IUP baik itu tanah masyarakat itu sendiri maupun kawasan hutan atau hutan konversi sesuai kesepakatan pelepasan lahan (di luar areal IUP). Apabila pelepasan lahan hutan (baik hutan konversi maupun hutan produksi), maka harus atas persetujuan Kementerian Kehutanan. Lalu apabila perusahaan melakukan pelepasan lahan masyarakat (baik pribadi maupun komunal), maka perusahaan melakukan negosiasi dengan pemilik lahan dan menjadikan pemilik lahan tersebut sebagai petani peserta PIR (sumber: <http://disbunak.tanjabarkab.go.id>).

Namun di beberapa kasus ternyata sudah banyak perkebunan besar (inti) yang telah membangun perkebunan untuk rakyat sebelum diatur ke dalam Undang-Undang. Dengan demikian, UU Permentan Nomor 21 tahun 2017 juga membunyikan bahwa jika sudah terdapat perusahaan yang sudah menyediakan lahan perkebunan untuk masyarakat, maka luas lahan tersebut harus digenapkan sebanyak 20%. Lalu apabila tidak ada kawasan yang dapat dibuka untuk dijadikan lahan perkebunan, maka perusahaan dapat menciptakan kegiatan produktif lain yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan masyarakat sekitar (dapat melalui pola bagi hasil, kredit atau pola kemitraan lainnya) [sumber: <http://disbunak.tanjabarkab.go.id>]. Sekarang peraturan ini sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan kebijakan yang sama (sumber: [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)). Aturan ini dapat direpresentasikan sebagai wujud kemitraan yang terjalin antara keberadaan

perusahaan besar dan ketersediaan masyarakat dalam menerima perusahaan tersebut.

Meskipun menjadi salah satu prioritas nasional dan telah diatur dalam UU, eksistensi PIR yang digadangkan menjadi solusi untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat justru membentuk pola kemiskinan baru. Budaya perkebunan yang hierarkis menjadi cambukan bagi berjalannya perkebunan PIR. Relasi kuasa yang tercipta dalam lingkungan perkebunan PIR menjadikan para pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan produksi internal mengalami subordinasi. Akibatnya, para pelaku usaha menjadi ketergantungan dan berada di bawah otoritas struktural sebagai pembuat kebijakan.

PIR-BUN Danau Kembar adalah bukti nyata dari perkebunan rakyat yang masih eksis sebagai kemitraan dari PTP Nusantara IV Unit Usaha Danau Kembar dengan komoditas teh hitam. Secara administrasi kewilayahan pemerintah, perkebunan ini berada di dua nagari<sup>1</sup>, yaitu Nagari Aie Batumbuek dan Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Hal ini karena kebun teh milik perusahaan inti yaitu PTP Nusantara IV Unit Usaha Danau Kembar terbentang di beberapa titik dalam dua nagari tersebut, yang terdiri dari Afdeling A dan B. Begitu juga lahan PIR-BUN merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Sektor A, B, dan C dan administrasi perkebunan dikelola oleh pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Manunggal dan mandiri. Perkebunan PIR ini berdiri pada tahun 1985 dan sudah mulai berproduksi dua tahun setelahnya. Karena berada

---

<sup>1</sup> *Nagari* adalah pembagian wilayah administrasi di bawah kecamatan yang berada di Provinsi Sumatera Barat (Mulia *et al.*, 2020)

di dua nagari, maka pemilik lahan dan buruh perkebunan pun sebahagian besar berasal dari kedua nagari tersebut.

Dalam kegiatan perekonomian perkebunan, buruh adalah salah satu pilar operasional penting dalam keberlangsungan produksi. Menurut teori *plantation society* oleh Beckford (1972), dalam sistem perkebunan antara buruh perkebunan dengan pemilik atau pengelola kebun membentuk hubungan mutualisme. Di satu sisi pemilik kebun membutuhkan pekerja untuk melakukan proses produksi namun di sisi lain bagi buruh hal ini justru menjadi upaya untuk bertahan hidup. Dalam artian bahwa kesejahteraan ekonomi saling bergantung satu sama lain. Pengadaan buruh perkebunan dengan kapasitas besar tak lepas dari kenyataan bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia yang cukup pesat. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terpadat nomor empat di dunia (hingga Februari 2023 sekitar 276,8 juta jiwa) (Dewi dan Hartana, 2023).

Sebagai pilar utama dalam kegiatan produksi di lapangan, buruh adalah pelaku usaha yang paling rentan dengan kemiskinan yang telah terjadi dari zaman kolonial. Berdasarkan perspektif Gans yang melihat kemiskinan secara struktural fungsional menggambarkan bahwa kemiskinan buruh merupakan akibat dari faktor struktural (Gans, 1971). Kemiskinan struktural terbentuk akibat budaya perkebunan yang melanggengkan kemiskinan buruh sebagai kelas paling bawah melalui elemen-elemen struktural yang telah dinormalisasi oleh sistem perkebunan. Posisi subordinat buruh berusaha dipertahankan struktur untuk keberlangsungan sistem perkebunan melalui relasi kuasa.

Kemiskinan yang dialami buruh pada kajian ini merupakan implikasi dari adanya elemen-elemen struktural yang melanggengkannya. Penciptaan perkebunan PIR yang secara notabene dikuasai oleh masyarakat lokal namun juga bergantung pada kebijakan perusahaan inti. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun secara operasional perusahaan inti hanya membeli komoditas, namun ia memegang pasar yang menjadi target utama dalam sistem perkebunan. Akibatnya, pemilik lahan berada di bawah otoritas perusahaan inti dalam menentukan harga pasar dan buruh menjadi kaum yang mengalami subordinasi akibat tidak adanya kuasa dan akses sumber daya yang dapat diperhitungkan.

Kajian ini memaparkan tentang konsep kemiskinan struktural yang terjadi pada lingkungan perkebunan PIR-BUN Danau Kembar dengan menggunakan perspektif Gans. Dalam pandangan Gans, kemiskinan struktural pada perkebunan PIR ini terjadi akibat relasi kuasa (struktur) yang menciptakan kemiskinan pada pelaku usaha di dalamnya. Namun, pada penelitian ini buruh menempati posisi yang paling rentan untuk mengalami kemiskinan. Tak lain karena buruh berada dalam posisi subordinat yang menyebabkan buruh mudah diperalat untuk menjalankan sistem perkebunan.

Para buruh pemetik teh menggantungkan hidupnya hanya pada pendapatan hasil produksi di kebun. Dengan harga yang sangat fluktuatif, tentu ini akan menjadi determinasi bagi kesejahteraan buruh pemetik teh. Pendapatan yang tidak menetap (fluktuatif) inilah yang menjadi alasan langgengnya kemiskinan buruh pemetik teh. Seperti yang disampaikan oleh bendahara KUD Manunggal Kayu Jao, informan G (60 tahun) bahwa:

*“Harga pucuk teh yang ditetapkan perusahaan inti sering berubah-ubah. Biasanya perubahannya sekali dalam dua bulan. Tidak ada harga pasti yang ditetapkan karena mutu pucuk teh terkadang juga berubah. Namun hal ini cukup menyulitkan pekerja di kebun teh dalam sistem pengupahan yang naik-turun”.*

Skema pengupahan bertingkat berupa perusahaan inti akan memberikan harga beli kepada pemilik lahan. Dari pemilik lahan daya beli teh akan kembali dikurangi untuk pengeluaran biaya operasional kebun. Lalu diserahkan sebagai upah buruh. Misal pada PIR-BUN Danau Kembar pada Januari 2025 harga teh yang ditetapkan oleh perusahaan inti kepada pemilik lahan adalah Rp2.850/kg. Dengan begitu, pemilik lahan menetapkan harga beli teh dari buruh sekitar Rp750-Rp900/kg. Nominal ini akan kian berubah tergantung mutu pucuk teh. Dengan sistem pengupahan bulanan, rata-rata penghasilan yang diperoleh para buruh pemetik teh bisa mencapai Rp2.200.000 per bulan. Namun, saat cuaca sedang tidak mendukung untuk pertumbuhan pucuk dan saat mutu pucuk rendah (terserang penyakit), penghasilan bahkan bisa hanya Rp500.000 sebulan. Pendapatan ini masih merupakan penghasilan kotor, karena belum dikurangi untuk menutupi hutang sembako, memenuhi kebutuhan domestik, transportasi, pendidikan anak, dan pengeluaran lainnya.

Dalam memaknai kemiskinan, definisi kemiskinan diungkapkan dalam beberapa perspektif. Kemiskinan menurut BPS (dalam Hilmi *et al.*, 2022) adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar (pangan dengan AKG 2100 kkal maupun non-pangan) untuk menciptakan kehidupan yang bermartabat. Hingga September 2024, BPS mengeluarkan ketentuan bahwa garis kemiskinan masyarakat Kabupaten Solok berada pada

pendapatan per-kapita  $\pm$ Rp569.000/per-bulan (BPS, 2025). Namun, angka yang ditetapkan ini secara realitas dapat dikatakan tidak cukup. Hal ini diperparah oleh kenaikan harga sembako yang tidak sebanding dengan upah yang diterima, menyebabkan nilai rupiah melemah.

Berdasarkan garis kemiskinan yang dipaparkan dalam angka seperti definisi di atas, pengeluaran dan tanggungan dari keluarga buruh pemetik teh PIR (khususnya pada keluarga PIR-BUN Danau Kembar) membuat mereka berada dalam kondisi miskin. Peralnya dalam beberapa kasus, penulis menemukan jumlah tanggungan yang dimiliki oleh keluarga buruh sebanyak 3 lapis generasi yang justru tidak mengarahkan mereka menuju sejahtera. Misalnya dalam satu kasus dengan gaji Rp2.000.000 dan terdapat suami-istri, 3 anak, dan 1 orang tua dalam rumah tangga tersebut, maka masing-masing akan memperoleh Rp334.000 per-kapita dalam sebulan. Dengan demikian keluarga tersebut berada dibawah garis miskin.

Adapun garis kemiskinan menurut World Bank tahun 2024 adalah US\$ 3,2 perkapita per-hari atau setara dengan Rp52.300/hari (sumber: [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)). Namun, pendapatan ini kurang relevan dengan situasi perekonomian Indonesia sekarang ini. Seperti yang dipaparkan oleh Ben B. Seligman dalam tulisannya yang berjudul *Poverty and The Economy* (dalam Menno & Mustamin, 1994) bahwa distribusi pendapatan memang relevan dalam mengukur kemiskinan, namun tidak cukup memperlihatkan kemiskinan itu. Karena, dari perspektif ilmu sosial bahwa kemiskinan itu bersifat multidimensional, bukan hanya secara ekonomi, namun juga sosial, politik, dan budaya.

Menurut seorang antropolog Thomas Gladwin (dalam Menno & Mustamin, 1994), bahwa kemiskinan bukan saja berada dalam keadaan pendapatan kurang, namun juga terhina dan tidak berketerampilan, serta tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan. Adapun menurut Menno dan Mustamin (1994) bahwa kemiskinan (struktural) adalah kemiskinan yang tercipta kekal yang disebabkan oleh mereka yang ada di struktur sosial lebih tinggi dalam masyarakat, dengan tidak memberi kesempatan bagi kaum miskin untuk beranjak ke atas dalam memperbaiki taraf hidup. Parsudi Suparlan (1984) juga mengemukakan bahwa kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu suatu tingkat kekurangan materi pada suatu golongan orang yang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat. Pendefinisian dari kaca mata para ahli sosial ini memperkuat asumsi penulis bahwa buruh pemetik teh PIR mengalami kemiskinan.

Realitasnya dalam memenuhi kebutuhan pokok untuk bertahan hidup, buruh pemetik teh melakukan berbagai strategi. Sebagai contoh bahwa buruh pemetik teh PIR-BUN Danau Kembar sebagian besar menggunakan sistem *kas bon*<sup>2</sup> di toko sembako yang di beberapa kasus juga merupakan milik majikannya (pemilik lahan). Namun sistem ini hanya mengantarkan buruh pada lingkaran utang yang tak terselesaikan. Selain itu, hak buruh atas kesejahteraan dalam bekerja belum diperoleh. Seperti jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja. Melalui fasilitas tempat tinggal non-permanen berukuran 6×8 m<sup>2</sup> yang disediakan pemilik lahan untuk buruhnya, tidak didukung oleh sumber air. Tiap keluarga harus

---

<sup>2</sup> Sistem pinjaman karyawan/buruh dengan pelunasan yang akan langsung dipotong oleh pemberi gaji sebagai bentuk fasilitas yang memudahkan karyawan/buruh dalam memenuhi kebutuhan pokok. Sistem ini dapat berupa uang maupun sembako atau lainnya (Putria, 2022).

mengangkut air dari sumber air yang berada di lembah melewati lereng perkebunan teh. Selain itu, beberapa rumah masih belum mendapat aliran listrik.

Isu ketergantungan buruh pemetik teh jelas adanya karena alasan untuk *survive*. Pekerjaan perkebunan tampak seperti pekerjaan warisan karena rata-rata pekerjaan ini dilakukan oleh pekerja yang berasal dari keluarga pekerja perkebunan juga (Aulia *et al.*, 2023). Selain itu, penulis melihat adanya fenomena bahwa buruh pemetik teh banyak yang menjadikan kebun sebagai satu-satunya sumber pemasukan. Hal ini juga karena keterbatasan akses sumber daya produktif oleh buruh. Kalaupun ada biasanya berupa lahan untuk diolah sebagai ladang yang dipinjamkan oleh pemilik lahan di sekitar area perkebunan. Mereka hanya dapat menanam tanaman hortikultura untuk kebutuhan domestik (seperti penerapan pertanian *subsisten*<sup>3</sup>) yang bahkan terkadang gagal panen karena perawatan yang kurang layak.

Kondisi kemiskinan buruh pemetik teh dapat dilihat dalam buku Syahrizal (2006) yang berjudul “Strategi Buruh Perkebunan Mengatasi Kemiskinan Studi di Perkebunan Teh PT. Mitra Kerinci Sumatera Barat” bahwa upah buruh perkebunan tidak terlalu banyak mengalami perubahan sejak zaman kolonial. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi buruh dalam mempertahankan hidupnya dengan menerapkan berbagai strategi, misalnya melakukan pekerjaan tambahan. Hal yang paling berpeluang untuk menambah pendapatan oleh buruh PIR adalah dengan berladang. Namun kegiatan pertanian seperti berladang tidak dapat sepenuhnya

---

<sup>3</sup> Pertanian *subsisten* adalah sistem pertanian yang komoditasnya hanya cukup untuk kebutuhan keluarga dan dikonsumsi secara langsung (Martin *et al.*, 2016).

menopang perekonomian ataupun menjadi penambah. Lazimnya, masyarakat desa khususnya masyarakat perkebunan melakukan sistem *subsistence farming* (Soekanto, 1990). Dengan penerapan kegiatan pertanian subsisten akan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Titik Sumarti (2007) juga melakukan kajian tentang “Kemiskinan Petani dan Strategi Nafkah Ganda Rumahtangga Pedesaan” pada buruh perkebunan kelapa dan kelapa sawit rakyat yaitu PIR-Trans di Propinsi Riau. Dalam tulisannya, petani kelapa sawit sangat bergantung kepada perusahaan inti. Kemiskinan juga terjadi karena ketidakberdayaan komunitas petani kelapa dalam mengelola lahannya dengan baik. Selanjutnya kajian oleh Heru Purwandari (2011) bahwa fakta fenomena kemiskinan yang dialami oleh buruh perkebunan merupakan sesuatu yang kontradiktif mengingat perkebunan merupakan sebuah bidang usaha yang terintegrasi ke dalam ekonomi besar secara regional dan global.

Merujuk pada paparan di atas, alasan dasar penelitian tentang isu kemiskinan buruh pemetik teh sebagai produk sistem Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) pada buruh pemetik teh PIR-BUN Danau Kembar ini dilakukan adalah karena penulis mengidentifikasi adanya bentuk kemiskinan yang sudah terjadi dalam waktu lama oleh buruh pemetik teh akibat faktor struktural. Kondisi marginal para buruh juga mendukung langgengnya kemiskinan dimana keluarga buruh pemetik teh tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosial masyarakat. Hal ini dalam jangka waktu yang lama menimbulkan norma-norma yang baru sehingga terinternalisasi oleh masyarakat miskin dan akhirnya berkontribusi pada lingkaran kemiskinan dengan pola pikir ‘tak berdaya’ oleh

buruh. Bentuk kemiskinan buruh pemetik teh terjadi akibat faktor struktural yang menimbulkan rendahnya pendapatan, kurangnya kesempatan dalam lingkungan sosial, terbatasnya akses terhadap fasilitas, serta isolasi sosial.

Penelitian ini diangkat dengan menggunakan perspektif kemiskinan struktural oleh Gans dimana kajian ini memperlihatkan bahwa kemiskinan merupakan akibat dari elemen-elemen struktural yang berperan dalam menciptakan dan melanggengkan kemiskinan di dalam lingkungan perkebunan. Pemilik lahan yang notabene merupakan orang yang memiliki akses penuh terhadap sumber daya, justru juga berada dibawah kontrol sistem perkebunan melalui nilai-nilai pertanian monokultur yang mendorong unsur hierarki didalamnya. Namun, pada penelitian ini penulis mengangkat buruh pemetik teh sebagai kelas yang paling rentan terhadap kemiskinan dimana buruh tidak memiliki akses apapun selain menjadi pekerja di lingkungan perkebunan. Posisi subordinat buruh menjadikan mereka sebagai budak struktural untuk menjalankan pekerjaan yang selama ini tidak dilakukan oleh kaum kelas atas.

Adapun kebaruan dari penelitian ini adalah cara pandang melihat kemiskinan dalam kalangan buruh pemetik teh sebagai kaum marginal dalam tatanan sistem sosial-ekonomi di lingkungan perkebunan. Sejauh ini, penelitian tentang kemiskinan pada perkebunan plasma terjadi pada petani plasma (pemilik lahan). Penelitian ini membawa perspektif baru dalam melihat kemiskinan yang sebenarnya terjadi pada lapisan paling rentan, yaitu buruh perkebunan akibat ketergantungan dengan pola berulang yang membawa mereka berada dalam lingkaran kemiskinan. Dalam penelitian ini, buruh yang mengisi posisi paling

‘subordinat’ yang biasanya ‘tak terlihat’ dalam narasi keberhasilan PIR menjadi subjek utama. Perspektif struktural dengan pendekatan antropologi yang melandaskan teori kemiskinan oleh Gans dalam memberikan pandangan baru bahwa keberadaan sistem PIR yang cenderung dianggap sebagai pengentas kemiskinan, pemerataan dan pemberdayaan ekonomi, justru membuat kemiskinan baru dan/atau mengganggu fenomena kemiskinan yang sudah ada. Dengan demikian, dalam kajian ini kemiskinan bukan sekedar akibat batasan individu, melainkan relasi kuasa yang berada pada tingkat struktural yang berusaha menempatkan buruh berada dan layak dalam posisi terendah.

Lokasi perkebunan teh PIR-BUN Danau Kembar masih jarang dikritisi oleh peneliti sosial dimana terdapat buruh upahan yang sangat rentan dalam kemiskinan. Penelitian seperti ini menjadi isu baru bagi peneliti sosial terkhusus bagi ahli antropologi dan sosiologi dalam melihat perilaku buruh pemetik teh dan perilaku sosial yang terbentuk. Hal ini juga dapat menjadi peluang bagi pembuat kebijakan dalam mengatasi kemiskinan berulang pada buruh perkebunan dalam perspektif sosial, bukan hanya dari perspektif ekonomi.

Selain itu, penelitian ini berbeda dari penelitian lainnya yang awam mengangkat tentang ‘mengapa buruh miskin’ secara individual. Pada penelitian ini, penulis memaparkan bagaimana perkebunan berperan aktif dalam mengganggu kemiskinan. Kajian ini mengangkat relasi kuasa, bukan sekedar kegagalan kebijakan atau keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, kajian ini berbeda dengan kajian terdahulu yang melihat PIR sebagai solusi, namun justru PIR

menciptakan struktur yang melanggengkan kemiskinan buruh dengan antropologi sebagai pisau analisis.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena kemiskinan yang dialami bukan sekadar persoalan individu, melainkan hasil dari struktur sosial, ekonomi, dan relasi kekuasaan dalam sistem perkebunan. Kajian ini penting untuk mengisi kekosongan akademik, mengungkap ketidakadilan sosial yang tersembunyi, serta menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada buruh perkebunan.

Selain itu, penelitian ini penting untuk dilakukan karena kemiskinan berlanjut akibat kebijakan yang tidak tepat sasaran bagi para buruh pemetik teh PIR. Dalam memahami isu kemiskinan seharusnya dikaji dengan cara mempertimbangkan sisi subjektif dari informan untuk mendengar aspirasi mereka. Hal ini akan membantu pihak *stakeholder* dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Karena realitasnya kebijakan berupa memberikan bantuan oleh pemerintah seperti yang sudah-sudah belum efektif dalam memberi solusi bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Perkebunan bukan hanya sebagai untuk memperoleh sumbangan besar untuk pendapatan nasional, namun perkebunan juga sudah menjadi *food, feed, dan fuel* bagi negara Indonesia (Mahagiyani dan Aries, 2022). Perkebunan menjadi sebuah peluang yang berpotensi mulai dari segi ketersediaan lapangan kerja hingga keberlanjutan angka produksi yang akan berimplikasi terhadap pendapatan

masyarakat. Namun, posisi sebagai buruh perkebunan masih belum dapat dikatakan sejahtera untuk sebagai salah satu penyumbang PDB Nasional.

Salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat secara merata adalah dengan pengadaan pola kemitraan perkebunan inti dan perkebunan rakyat yang juga disebut dengan pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN). Pola PIR-BUN merupakan salah satu bentuk pengenalan sistem pertanian monokultur yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat. Sistem perkebunan ini merupakan replika dari perkebunan perusahaan besar. Secara kuantitatif produksi PIR masih sangat jauh dari perusahaan inti karena lahan produksinya pun jauh berbeda luasnya. Selain itu dari segi kualitas mutu komoditas juga masih jauh, oleh karenanya harga komoditas selalu ditentukan oleh perusahaan inti sebagai penerima pasokan.

Pembangunan kemitraan perkebunan dengan pola PIR seperti ini dicanangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, realitasnya masih banyak petani peserta PIR yang kewalahan mengurus perkebunan karena biaya perawatannya sangat mahal. Selain itu, pemilik lahan membutuhkan buruh untuk membantu produksi. Karena keterbatasan-keterbatasan inilah sistem pengupahan buruh pada PIR-BUN masih dikatakan kurang mencukupi.

Banyak hal kontradiktif yang secara kasat mata terlihat bahwa belum tercapainya tujuan PIR secara nyata yaitu untuk kemakmuran bersama khususnya bagi kesejahteraan mikro. Perkebunan yang diperuntukkan sebagai sumber pendapatan masyarakat lokal dan pendatang yang justru menambah variasi kemiskinan baru di lingkungan perkebunan. Oleh karena itu, penulis membuat

pertanyaan rumusan masalah penelitian tentang “Kemiskinan Buruh Pemetik Teh sebagai Produk Sistem Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) studi analisis pada buruh pemetik teh PIR-BUN Danau Kembar, Kabupaten Solok” sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kemiskinan buruh pemetik teh PIR-BUN Danau Kembar?
2. Bagaimana PIR-BUN Danau Kembar ikut berperan dalam melanggengkan kemiskinan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan yang ingin penulis capai yaitu:

1. Menganalisis gambaran kemiskinan buruh pemetik teh PIR-BUN Danau Kembar;
2. Menganalisis peran PIR-BUN Danau Kembar dalam melanggengkan kemiskinan;

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini penulis berharap pembaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara multidimensi pada masyarakat perkebunan, khususnya pada buruh pemetik teh di perkebunan PIR-BUN Danau Kembar, Kabupaten Solok. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi seluruh pihak, baik secara akademis maupun praktis.

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Secara akademis, penelitian ini menjadi pengisi dalam kekosongan literatur tentang kemiskinan buruh perkebunan rakyat. Penelitian ini dapat menjadi wawasan yang lebih komprehensif bagi pembaca dalam memahami isu sosial yang sebenarnya banyak menerpa masyarakat Indonesia. Kajian ini dapat memberi pengetahuan pembaca akan tantangan yang dihadapi masyarakat perkebunan di Indonesia. Tulisan ini dapat menjadi rujukan atau bahan kajian pustaka dalam melihat kondisi kesejahteraan buruh pemetik teh khususnya sebagai lapisan terbawah dari sistem perkebunan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan dan langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan serta mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan di subsektor perkebunan Indonesia. Sekaligus, penelitian ini bertujuan untuk memberi masukan bagi pembuat kebijakan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga perilaku masyarakat yang yang kemungkinan sudah membudaya dapat perlahan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

Selain itu, penulis bertujuan memberikan perspektif baru dari kacamata antropologi bahwa kemiskinan adalah proses yang lambat laun akan terinternalisasi sebagai budaya, hendaknya mendukung pemerintah dalam melihat bahwa kemiskinan adalah fenomena permasalahan sosial yang harus diusut sebab dan prosesnya.